



## **Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kebijakan Pemerintah Berbasis Komunitas Untuk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Parepare**

**Darmawan Saputra**

**Universitas Muhammadiyah Parepare**

[darmawansa@gmail.com](mailto:darmawansa@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam kebijakan berbasis komunitas, mengukur tingkat partisipasi masyarakat, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan strategi optimal dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Parepare. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Kota Parepare. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Pengelolaan sampah rumah tangga menjadi tantangan utama dalam pembangunan perkotaan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan urbanisasi, produksi sampah terus bertambah, sehingga menuntut adanya kebijakan yang efektif dan berbasis komunitas. Pemberdayaan masyarakat menjadi pendekatan strategis dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah berbasis komunitas telah diterapkan melalui berbagai program, seperti bank sampah, pelatihan daur ulang, dan sosialisasi pengurangan sampah. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi lingkungan, penyediaan fasilitas pendukung, serta optimalisasi kerja sama antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan adanya sinergi yang baik, pengelolaan sampah berbasis komunitas dapat menjadi solusi yang berkelanjutan bagi Kota Parepare.

**Kata Kunci: Pemberdayaan; Masyarakat; Kebijakan; Sampah; Komunitas**

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the role of government in community-based policies, measure the level of community participation, identify the challenges faced, and formulate optimal strategies in managing household. The research method used is a qualitative approach with a case study in Parepare City. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. Household waste management is a major*



*challenge in urban development, including in Parepare City. Along with the increasing population and urbanization, waste production continues to increase, thus requiring effective and community-based policies. Community empowerment is a strategic approach in efforts to manage waste sustainably. The results of the study indicate that community-based waste management policies have been implemented through various programs, such as waste banks, recycling training, and waste reduction socialization. However, there are still obstacles such as low public awareness, limited infrastructure, and lack of coordination between stakeholders. Therefore, it is necessary to improve environmental education, provide supporting facilities, and optimize cooperation between the government, community, and private sector. This study confirms that community empowerment in household waste management policies plays an important role in creating a clean and healthy environment. With good synergy, community-based waste management can be a sustainable solution for Parepare City.*

**Keywords:** *Empowerment; Community; Policy; Waste; Community*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan kota-kota di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang tentang pengelolaan sampah. Dijelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah, daur ulang, pemanfaatan kembali sampah) dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan) (UU RI. No 18 tahun 2008. Pasal 1, 20 dan 22). Wewenang. Hal ini terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang semakin pesat, volume sampah rumah tangga terus meningkat. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, serta berkontribusi terhadap perubahan iklim akibat emisi gas metana dari tumpukan sampah organik.

Menurut (Padmi, 2011), bahwa “sampah yang berasal dari pemukiman/tempat tinggal dan daerah komersial, selain terdiri atas sampah organik dan anorganik, juga dapat berkategori B3. Sampah organik bersifat biodegradable sehingga mudah terdekomposisi, sedangkan sampah anorganik bersifat *non-biodegradable* sehingga sulit terdekomposisi. Bagian organik sebagian besar terdiri atas sisa makanan, kertas, kardus, plastik, tekstil, karet, kulit, kayu, dan sampah kebun. Bagian anorganik sebagian besar terdiri dari kaca, tembikar, logam, dan



debu. Sampah yang mudah terdekomposisi, terutama dalam cuaca yang panas, biasanya dalam proses dekomposisinya akan menimbulkan bau dan mendatangkan lalat”.

Dalam menangani sampah, baik organik (sampah basah) yang terdiri dari daun-daunan, kayu, kertas, karton, tulang, sisa-sisa makanan ternak, sayur, buah, dan lain-lain, dan sebagai. Sementara sampai anorganik (sampah kering) terdiri dari kaleng, plastik, besi dan logam-logam lainnya, gelas dan mika, tidaklah mudah karena menumpuk dalam skala yang besar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang efektif dan berbasis komunitas guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga tersebut.

Masih menurut (Padmi, 2011) bahwa “besarnya penduduk dan keragaman aktivitas di kota-kota metropolitan di Indonesia seperti Jakarta, mengakibatkan munculnya persoalan dalam pelayanan prasarana perkotaan, seperti masalah sampah. Diperkirakan hanya sekitar 60 % sampah di kota-kota besar di Indonesia yang dapat terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yang operasi utamanya adalah pengurugan (landfilling). Banyaknya sampah yang tidak terangkut kemungkinan besar tidak terdata secara sistematis, karena biasanya dihitung berdasarkan ritasi truk menuju TPA. Jarang diperhitungkan sampah yang ditangani masyarakat secara swadaya, ataupun sampah yang tercecer dan secara sistematis dibuang ke badan air”.

Masyarakat dengan berbagai latar belakang juga memiliki karakter yang berbeda-beda dalam menangani sampah tidak menyadari bahwa sampah dapat menyebabkan penyakit jika dibuang sembarangan, bahkan di jalan-jalan umum pun dijadikan tempat pembuangan sampah rumah tangga mereka. Kesadaran bahwa sampah adalah sumber penyakit masih rendah di kalangan masyarakat pada umumnya.

Dalam penanganan sampah dibutuhkan strategi agar masyarakat sadar dalam menangani sampah di lingkungannya. Hal ini sebagaimana hasil penelitian (Nurlaela et al., 2023), bahwa “setiap rumah tangga memilah sampah mereka pada tiga tempat, sampah plastik dikirim ke industri yang mengolah sampah plastik dan sampah kertas dikirim ke industri pengolah kertas misalnya, sedangkan sampah organik diproses menjadi kompos”.

Hasil penelitian (Achsani & Ekomady, 2018) bahwa “pengelolaan sampah berbasis komunitas cukup berhasil diterapkan karena bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat.



Lewat para tokoh masyarakat ini, inisiator membangun jejaring dengan masyarakat dan pihak Kelurahan setempat. Kegiatan dimulai dengan aneka aktivitas informal melalui diskusi di rumah-rumah masyarakat dan edukasi pada acara-acara yang diadakan oleh masyarakat. Penyampaian gagasan bisa berlangsung secara timbal balik dan masyarakat dapat menerima gagasan tentang pengelolaan sampah dengan lebih baik”.

Pemerintah harus tegas dan memberikan penyadaran kepada warga masyarakat dengan cara pemberdayaan masyarakat. Karena pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pendekatan yang banyak diterapkan dalam berbagai kebijakan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sampah. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan peran aktif masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan adanya keterlibatan komunitas, proses pengelolaan sampah dapat dilakukan dari tingkat rumah tangga hingga skala kota secara lebih efisien dan efektif.

Pemerintah Kota Parepare telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan sampah, seperti pengadaan fasilitas pengelolaan sampah, program edukasi lingkungan, serta penerapan regulasi terkait pengelolaan sampah berbasis komunitas. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya infrastruktur pendukung, serta keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Oleh karena itu, kajian mengenai pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan pemerintah berbasis komunitas untuk pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Parepare menjadi penting untuk dilakukan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu dikaji, yaitu: (1) Bagaimana peran pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan berbasis komunitas untuk pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Parepare? (2) Sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga? (3) Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah? (4) Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Parepare?



### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam hal ini adalah: (1) Menganalisis kebijakan pemerintah Kota Parepare dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis komunitas; (2) Menilai tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga; (3) Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampa; (4) Merumuskan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain: (1) Manfaat Akademik: Menambah wawasan dan literatur ilmiah terkait konsep pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan pengelolaan sampah berbasis komunitas; (2) Manfaat Praktis: Memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Parepare dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif; (3) Manfaat Sosial: Mendorong kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga secara lebih baik.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian ini mengacu pada beberapa teori utama terkait pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sampah, yaitu:

#### **Pemberdayaan Masyarakat**

Konsep pemberdayaan masyarakat atau dikenal dengan istilah *social empowerment* ini muncul karena kegagalan konsep pembangunan di masa lalu, (Habib, 2021). Pemerintah pada prinsipnya selalu ingin mencari jalan keluar yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Mengelola sampah tidaklah mudah, karena memerlukan daya kreatif dan manajerial yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penelitian (Widjajanti, 2011) dijelaskan bahwa “Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan”.

Secara etimologis kata pemberdayaan berasal dari kata “daya” artinya kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan masyarakat secara umum merupakan upaya mengikutsertakan warga dalam suatu program yang bertujuan untuk



kesejahteraan bersama. Kapasitas masyarakat perlu ditingkatkan dengan pemahaman pada program yang ingin dilaksanakan terutama oleh pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam suatu komunitas agar mereka dapat mengendalikan kehidupan mereka sendiri, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, serta menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kapasitas atau *capacity building*.

Adapun konsep peningkatan kapasitas merujuk pada proses penguatan keterampilan, pengetahuan, serta sumber daya yang dimiliki oleh individu maupun kelompok dalam suatu komunitas. Tujuannya adalah agar mereka mampu mengidentifikasi masalah, mencari solusi, serta mengelola berbagai aspek kehidupan secara mandiri dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, keterampilan teknis, manajerial, serta akses terhadap informasi dan teknologi.

Dengan adanya peningkatan kapasitas, masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat dari program pembangunan, tetapi juga menjadi aktor utama dalam menciptakan perubahan.

### **Partisipasi Masyarakat**

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation“ diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. kaitkan dengan peran serta, (Ngongare et al., 2019).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah proses di mana individu dan kelompok dalam suatu komunitas berperan serta dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Dengan melibatkan masyarakat, pembangunan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, lebih efektif, dan lebih berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan faktor kunci dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan Pembangunan -dari perencanaan hingga



evaluasi-pembangunan dapat lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, diperlukan edukasi yang lebih luas, transparansi dalam penyelenggaraan pembangunan, serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

### **Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas**

Pengelolaan sampah berbasis komunitas adalah pendekatan pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi aktif warga dalam setiap tahap, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengolahan, hingga pemanfaatan sampah. Komunitas atau masyarakat menjadi pelaku utama, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Dalam sistem ini, masyarakat diberdayakan untuk mengelola sampah secara mandiri dengan dukungan dari pemerintah, LSM, maupun sektor swasta. Model ini tidak hanya berorientasi pada pengurangan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas telah dilakukan oleh (Utami et al., 2008), Pemilahan sampah merupakan pemisahan sampah berdasarkan karakteristiknya yang meliputi sampah organik dan anorganik. Sedangkan perlakuan terhadap sampah merupakan kegiatan daur ulang sampah terutama untuk sampah organik menjadi kompos. Perbedaannya terletak pada: 1) tahapan proses dan pelaku yang terlibat dalam sistem pengelolaan; 2) bentuk dan pendekatan dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah berbasis komunitas merupakan pendekatan yang tidak hanya menjawab persoalan teknis pengelolaan limbah, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Ketika masyarakat diberi ruang untuk berperan, dilatih, dan didukung, mereka dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Dengan memperkuat program edukasi, memperluas dukungan infrastruktur, serta membangun kemitraan multi-pihak, pendekatan ini dapat menjadi model pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di berbagai daerah lainnya. Kota Parepare, dengan potensi komunitasnya yang kuat, memiliki peluang besar untuk menjadi contoh sukses pengelolaan sampah berbasis komunitas di Indonesia.



## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tentang pengelolaan sampah berbasis komunitas di Kota Parepare. Data dikumpulkan melalui: (1) Wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan warga setempat; (2) Observasi lapangan untuk melihat langsung implementasi kebijakan pengelolaan sampah; (3) Studi dokumentasi terhadap regulasi dan kebijakan yang telah diterapkan.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif guna memahami dinamika pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah rumah tangga, (Tobing & David, 2017); (Rahardjo, 2011); (Arikunto, 2014); (Silalahi, 2015).

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kota Parepare dalam pengelolaan sampah rumah tangga sudah mulai berkembang, meskipun belum merata di seluruh wilayah. Dalam beberapa komunitas, seperti kelompok ibu rumah tangga dan pemuda karang taruna, keterlibatan dalam kegiatan pengelolaan sampah seperti pemilahan sampah, pengomposan, dan kegiatan bank sampah terbilang aktif. Namun, di wilayah-wilayah lain, kesadaran dan partisipasi masih terbatas akibat kurangnya informasi, minimnya motivasi, dan belum adanya fasilitator komunitas yang mendorong keterlibatan. Hal ini mencerminkan bahwa pemberdayaan masyarakat belum menyentuh seluruh lapisan warga secara optimal. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berbasis komunitas, pelaksanaannya masih bergantung pada inisiatif lokal dan kapasitas komunitas masing-masing.

Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Lingkungan Hidup telah meluncurkan beberapa program strategis, seperti program "Kampung Proklam" (Program Kampung Iklim), pelatihan pengelolaan sampah organik, serta pendampingan teknis untuk bank sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif pemerintah tersebut cukup berdampak di beberapa wilayah yang responsif terhadap program pemberdayaan. Namun demikian, masih ditemukan kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Beberapa responden menyampaikan bahwa program yang ditawarkan kurang tepat sasaran, belum berkelanjutan, dan cenderung bersifat top-down. Hal ini menjadi catatan penting



bahwa pemberdayaan yang efektif seharusnya dibangun atas dasar kebutuhan dan potensi lokal yang dikenali secara partisipatif.

Peningkatan kapasitas Masyarakat, baik melalui pelatihan teknis, kampanye kesadaran lingkungan, maupun penguatan kelembagaan komunitas terbukti memiliki korelasi positif terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Warga yang telah mengikuti pelatihan memilah sampah atau daur ulang menunjukkan perubahan sikap yang signifikan dalam pengelolaan sampah di rumah tangga mereka.

Hasil penelitian (Virgota et al., 2020) bahwa dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang langsung dipraktikkan dan melalui bimbingan yang intensif. Misalnya, pengolahan sampah organik untuk pembuatan kompos/pupuk organik, dan pemanfaatan kompos untuk media budidaya taman vertikultur. Pelatihan dan praktik dilaksanakan untuk ketrampilan masyarakat. Juga dilakukan pendampingan yang dilaksanakan dalam rangka memotivasi masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan sampah organik sebagai kompos, sehingga lingkungan permukiman.

Bank sampah menjadi contoh nyata hasil dari peningkatan kapasitas masyarakat. Peran Bank Sampah menjadi penting dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. PP tersebut mengatur tentang kewajiban produsen untuk melakukan kegiatan 3R dengan cara menghasilkan produk yang menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam; yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin; menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan diguna ulang; dan/atau menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang dan diguna ulang. Hasil penelitian (Suryani, 2014) menyatakan bahwa bank sampah sangatlah bermanfaat dalam pengelolaan sampai sekaligus menghasilkan uang bagi masyarakat. Hal yang sama juga merupakan hasil penelitian (Syafudin, 2015); (Putra & Ismaniar, 2020); (Asteria & Heruman, 2016); (Shentika, 2016); (Auliani, 2020); (Ariefahnoor et al., 2020).

Dengan adanya Bank Sampah, maka produsen dapat melakukan kerja sama dengan Bank Sampah yang ada agar dapat mengolah sampah dari produk yang dihasilkannya sesuai dengan amanat PP tersebut. Beberapa bank sampah yang telah berjalan lebih dari satu tahun mengalami perkembangan baik dari sisi jumlah anggota, volume sampah yang terkumpul, hingga nilai ekonomis yang dihasilkan. Selain itu, kegiatan pengolahan kompos dari limbah organik juga mulai tumbuh



sebagai bagian dari program urban farming berbasis rumah tangga. Namun, tantangan muncul ketika keberlanjutan program masih sangat tergantung pada bantuan pemerintah dan pendampingan dari pihak luar. Ketika pendampingan berhenti, beberapa komunitas mengalami stagnasi atau bahkan berhenti menjalankan kegiatan. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas belum sepenuhnya membentuk kemandirian komunitas dalam jangka panjang.

Penelitian mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menghambat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, antara lain: (1) Kurangnya kesadaran kolektif: Banyak warga masih menganggap pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah semata; (2) Keterbatasan sumber daya: Beberapa komunitas tidak memiliki alat, tempat, atau dukungan logistik yang memadai untuk menjalankan kegiatan pengelolaan sampah secara mandiri; (3) Koordinasi lintas sektor yang lemah: Hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta belum berjalan secara sinergis. Banyak inisiatif yang berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi; (4) Belum maksimalnya regulasi lokal: Peraturan daerah (perda) terkait pengelolaan sampah rumah tangga belum ditegakkan secara optimal, sehingga belum menimbulkan efek jera terhadap pelanggaran, seperti pembuangan sampah sembarangan.

Pembahasan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa model pengelolaan sampah berbasis komunitas dapat berhasil jika melibatkan tiga unsur utama secara terpadu: pemerintah, masyarakat, dan mitra pendukung (seperti LSM atau sektor swasta). Model kolaboratif ini memerlukan adanya: (1) Peningkatan kapasitas yang berkelanjutan melalui pelatihan dan edukasi lingkungan; (2) Regulasi yang jelas dan mendukung implementasi di tingkat komunitas; (3) Insentif ekonomi atau sosial yang memotivasi masyarakat untuk terlibat; (4) Fasilitator lokal yang menjadi penggerak perubahan dari dalam komunitas itu sendiri.

Dengan sinergi tersebut, pemberdayaan masyarakat bukan hanya menjadi program sesaat, melainkan menjadi gerakan kolektif dalam menciptakan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan mandiri secara ekologis dan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan pemerintah berbasis komunitas di Kota Parepare masih memiliki potensi besar, tetapi membutuhkan peningkatan kualitas pelaksanaan dan penguatan koordinasi. Perlu pendekatan yang lebih partisipatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, agar pengelolaan sampah rumah tangga dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.



## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemberdayaan Masyarakat dalam Kebijakan Pemerintah Berbasis Komunitas untuk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan keberlanjutan program lingkungan yang ada. Partisipasi aktif masyarakat, terutama melalui wadah komunitas seperti bank sampah, kelompok daur ulang, dan kegiatan komposting, terbukti mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan warga.

Pemerintah Kota Parepare telah menunjukkan komitmen melalui berbagai kebijakan dan program berbasis komunitas. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya kesadaran kolektif, kurangnya fasilitas pendukung, serta koordinasi yang belum optimal antara pemerintah, masyarakat, dan mitra swasta. Upaya pemberdayaan yang telah dilakukan, seperti pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan, sudah memberikan dampak positif, tetapi masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat dan menciptakan kemandirian komunitas.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa pendekatan pengelolaan sampah yang efektif harus bersifat kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus menjadi fasilitator dan penguat kapasitas masyarakat. Dengan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta sinergi lintas sektor, maka pengelolaan sampah berbasis komunitas di Kota Parepare dapat menjadi model yang mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berdaya.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bukan hanya solusi teknis atas persoalan sampah, tetapi juga strategi sosial yang memperkuat peran warga dalam pembangunan kota yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achsani, R. A., & Ekomady, A. S. (2018). Penciptaan Tempat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Pengolahan Sampah Oleh Komunitas My Darling dan Kakasih). *Jurnal Koridor*, 9(1), 85–92.
- Ariefahnoor, D., Hasanah, N., & Surya, A. (2020). Pengelolaan Sampah Desa Gudang Tengah Melalui Manajemen Bank Sampah. *Jurnal Kacapuri : Jurnal Keilmuan Teknik Sipil*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.31602/jk.v3i1.3594>



- Arikunto, S. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods). *Bandung: Alfabeta*.
- Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 23(1), 8.
- Auliani, R. (2020). Peran Bank Sampah Induk dalam Pengelolaan Sampah Kota Medan. *Jurnal Abdidias*, 1(5), 330–338. <https://doi.org/10.31004/abdidias.v1i5.80>
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 1(2), 82–110. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Ngongare, A., Rompas, W. Y., & Kiyai, B. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 5, 1–13.
- Nurlaela, S., Wijoyo, A. K., Putri, A. M. R., Melinda, D., Sasan, C. Y., Resta, A. V., Hadi, D. P., Ashianti, O. A., Heriansyah, M. T., Permadi, A., & Kadarso, K. (2023). Strategi Membangun Sistem Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis Komunitas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(5), 605–611. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.988>
- Padmi, E. D. T. (2011). *Pengelolaan Sampah*. Institut Teknologi Bandung. <https://doi.org/10.1364/josaa.1.000711>
- Putra, W. T., & Ismaniar. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah di Bank Sampah. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.37411/jjce.v1i2.569>
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*.
- Shentika, P. A. (2016). Pengelolaan Bank Sampah di Kota Probolinggo. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 8(1), 92–100. <https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p092>
- Silalahi, U. (2015). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Refika Aditama.
- Suryani, A. S. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Aspirasi*, 5(1), 71–84. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/447/344>
- Syafrudin, Y. E. S. K. (2015). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah. *Indonesian Journal of Conservation*, 4(1), 83–94.
- Tobing, H., & David. (2017). *Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Program Studi Psikologi Fadok Udayana. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_1\\_dir/434113472f0dc64681fc958a8037db67.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/434113472f0dc64681fc958a8037db67.pdf)
- Utami, B. D., Siswi Indrasti, N., & Dharmawan, A. H. (2008). Pengelolaan Sampah



Rumahtangga Berbasis Komunitas: Teladan dari Dua Komunitas di Sleman dan Jakarta Selatan. *Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia*, 02(01), 49–68.

Virgota, A., Farista, B., Candri, D. A., Ahyadi, H., & Jupri, A. (2020). Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengolahan Sampah Sebagai Kompos di Kelurahan Dasan Geres Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 2(2). <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v2i2.376>

Widjajanti, K. (2011). *Jurnal Ekonomi Pembangunan Model pemberdayaan masyarakat*. 12.